

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Fungsi dan Tugas dari Perangkat Desa Gedangan

Berdasarkan hasil temuan observasi dan wawancara, secara keseluruhan penerapan fungsi dan tugas dari perangkat Desa Gedangan berjalan dengan cukup maksimal, yang mana dari perangkat desa tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Diperlukan adanya manajemen pemerintahan yang baik agar desa tersebut bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang ingin dicapai.

Tugas yang sudah menjadi tanggungjawab dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa Gedangan beserta aparatnya (perangkat desa). Yang mana semua pihak dapat memegang amanah dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melayani seluruh masyarakat. Disamping itu aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama juga mereka terapkan terutama pada penerapan rasa kedisiplinan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan maupun sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Hasil penelitian mendukung secara konsisten dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Rahmany dan Fatimah⁵⁷, terkait dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya kecurangan/kesalahan baik dalam pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan adanya pemantauan terhadap pencatatan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diinginkan dan bisa dipertanggungjawabkan.

⁵⁷ Sri Rahmany Dan Fatimah, *Analisis Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Akuntansi Syariah, 2020), Vol.4, No.1.

B. Penerapan Keefektifan Kinerja Perangkat Desa Gedangan

Berdasarkan hasil temuan penelitian Perangkat desa sedikit banyak ikut terlibat dalam memberikan masukan tentang rancangan APBDes. Tetapi masukan juga diperoleh dari suara masyarakat desa gedangan yang tau kebutuhan mereka. Pemerintahan Desa Gedangan sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas. Efektivitas kinerja perangkat desa dapat dilihat dari bagaimana mereka menjalankan tugasnya.

Efektivitas yang lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Dengan maksud bahwa efektif atau tidaknya suatu pekerjaan atau suatu usaha organisasi dapat dilihat dari sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas kinerja perangkat desa ini dilakukan dengan menerapkan beberapa peraturan desa yang telah disepakati bersama. Menurut Ahmad Ruky memberikan pengertian kinerja sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatannya selama kurun waktu.⁵⁸

Upaya penerapan keefektifan kinerja perangkat desa ini dilakukan dengan menggunakan nilai yang dilihat dari segi tanggungjawab individu perangkat desa terhadap tugas kerjanya (*job characteristics model*). Dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham, model karakteristik pekerjaan (*job characteristics model-JCM*) mengemukakan bahwa pekerjaan apa pun bisa dideskripsikan dalam lima dimensi pekerjaan

⁵⁸ Ruky Ahmad, *Sistem Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.15

utama.⁵⁹

- a. Keanekaragaman keterampilan (*skill variety*): tingkat sampai mana pekerjaan membutuhkan beragam aktivitas sehingga pekerja bisa menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Contoh pekerjaan yang mendapatkan nilai tinggi dalam keanekaragaman keterampilan adalah pemilik dan operator sebuah bengkel yang melakukan perbaikan elektris, merenovasi mesin, memodifikasi bodi kendaraan, dan berinteraksi dengan pelanggan. Pekerjaan yang mendapat nilai rendah dalam dimensi ini adalah pekerja toko bodi kendaraan yang menyemprot cat selama delapan jam per hari.
- b. Identitas tugas (*task identity*): tingkat sampai mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh bagian pekerjaan yang bisa diidentifikasi. Contoh pekerjaan yang mendapat nilai tinggi dalam identitas adalah tukang lemari yang mendesain furniture, memilih kayu, membuat objek, dan menyelesaikannya sampai sempurna. Contoh pekerjaan yang mendapat nilai rendah dalam dimensi ini adalah pekerjadi pabrik furnitur yang hanya mengoperasikan mesin bubut untuk membuat kaki meja.
- c. Arti tugas (*task significance*): tingkat sampai mana suatu pekerjaan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Contoh pekerjaan yang mendapat nilai tinggi dalam arti tugas adalah

⁵⁹ Stephen P. Robbins Dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi Organizational Behavior*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 269.

perawat yang menangani berbagai kebutuhan pasien dalam unit perawatan intensif rumah sakit. Contoh pekerjaan yang mendapat nilai rendah dalam dimensi ini adalah tukang bersih-bersih yang menyapu lantai di rumah sakit yang sama.

- d. Otonomi (*autonomy*): tingkat sampai mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan, serta keleluasaan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Contoh pekerjaan yang mendapat nilai tinggi dalam otonomi adalah penjual yang merencanakan pekerjaannya sendiri setiap hari dan memutuskan pendekatan penjualan yang paling efektif untuk setiap pelanggan tanpa pengawasan. Contoh pekerjaan yang mendapat nilai rendah dalam dimensi ini adalah penjual yang diberi serangkaian petunjuk setiap harinya dan diwajibkan mengikuti intruksi penjualan standar dengan setiap calon pelanggan
- e. Umpan balik (*feedback*): tingkat sampai mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kinerjanya. Contoh pekerjaan yang memperoleh umpan balik yang tinggi adalah pekerja pabrik yang merakit iPod, diharuskan mengirimkannya ke seorang pengawas pengendalian kualitas yang mengujinya untuk pengoperasian dan melakukan pembetulan yang diperlukan.

Tugas kerja (*job characteristics model*) pada penerapan efektifitas

kinerja perangkat desa tersebut memiliki bagiannya masing-masing yang sudah terstruktur dengan jelas dan terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Dan Kaur Perencanaan Atau Pembangunan. Dalam praktiknya, pemerintahan desa gedangan merupakan organisasi yang sangat menerapkan kedisiplinan dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Meskipun memiliki perbedaan dalam struktur organisasi namun tetap tujuan kerjanya sama.

Hasil penelitian menunjukkan dalam menjalankan aktifitasnya paraperangkat desa gedangan ini cukup memiliki peran yang besar dalam melakukan pekerjaannya, meskipun ada sedikit beberapa hambatan dari masing-masing individu seperti kurangnya kecakapan mereka terutama dengan usia yang cukup dalam mengoperasikan komputer dan rendahnya kemauan mereka untuk belajar. Hal tersebut akan menjadi evaluasi bersamasehingga dapat memperoleh solusi untuk memperbaiki dan lebih bisa meningkatkan kualitas pemerintahan desa gedangan.

Pendamping desa gedangan dalam wawancaranya mengatakan bahwasannya perlu ada peran aktif seorang pemuda-pemudi desa untuk mengawasi perkembangan pemerintah desa dalam menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Misalkan dengan melakukan pengecekan apakah bukti realisasi APBDes sudah terpapar dalam bentuk cetakan apa belum, sehingga transparansi bisa benar-benar diketahui oleh masyarakat.

Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh desi nurmala sari yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan dan bagaimana Analisis Sistyem Pengendalian Internal Pemerintahan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara teori dengan praktik yang diterapkan di Desa Dadapan⁶⁰. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dadapan antara teori dengan praktik yang diterapkan dalam mengelola dana desa belum sepenuhnya menerapkan SPIP karena kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan, hal tersebut dapat menyebabkan LPJ untuk dana desa disampaikan dengan terlambat.

Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu Subandi, dengan tujuan mengetahui dan menganalisis: 1). Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di lokasi penelitian, 2). Faktor-faktor yang menghambat kinerja parat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di lokasi penelitian.⁶¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat dikatakan berjalan

⁶⁰ Desi Nurmalasari, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁶¹ Wahyu Subandi, *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalog*, (Jurnal Ilmu Administrasi Public Dan Bisnis, 2019), Vol. 3 No. 2 dalam <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/> diakses pada 20 Maret 2021

dengan baik dan faktor yang menghambat kinerja yaitu kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan computer serta kurangnya motivasi dari diri aparat desa untuk mencapai tujuan kerja. Saran untuk pelaksanaan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa beserta aparat desa perlu melakukan fungsi kerja dan tugasnya secara maksimal agar lebih baik dalam melayani masyarakatnya dan perlu adanya pembelajaran atau kursus untuk aparat desa yang belum mahir menggunakan computer.

Hasil penelitian mendukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfah Andriani dan Tatik Zulaika terkait peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁶² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa sudah berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris desa dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan perangkat desa lainnya tentang pengelolaan dana desa. Sehingga diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁶² Ulfah Andriani dan Tatik Zulaika, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Jurnal Akademi Akuntansi, 2019), Vol.2 No.2 dalam <http://ejournal.umm.ac.i> diakses pada 20 Maret 2021

C. Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan temuan penelitian, secara keseluruhan penerapan sistem pengendalian internal terhadap pertanggungjawaban pelaporan laporan keuangan desa gedangan dapat berjalan cukup baik. Berikut ini penerapan sistem pengendalian internal terhadap pertanggungjawaban pelaporan laporan keuangan desa gedangan berdasarkan komponen-komponen yang sudah ditetapkan oleh peneliti:

1. Implementasi Pengawasan oleh Kepala Desa

Fungsi dalam bahasa inggris *function* yang berarti tugas atau peranan. Pengawasan berarti kekuasaan untuk mengatur, memerintah atau membatasi. Kamus bahasa indonesia mendefinisikan pengawasan sebagai kata benda berarti pemeriksaan, pengendalian. Kata kerjanya mengawasi yang berarti memeriksa. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan Tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai.

Hasil temuan penelitian sesuai dengan pernyataan Muchsan yang menyatakan bahwa untuk adanya Tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:⁶³

⁶³ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hal.38

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
2. Adanya suatu rencana yang ditetapkan sebagai alat pengujian terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
4. Tindakan pengawasan terakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
5. Untuk selanjutnya Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrative maupun yuridis.
6. Bentuk pengawasan kepala desa dalam mengawasi kinerja perangkat desa berjalan cukup baik, mulai dari adanya rapat rutin yang dilakukan setiap minggunya sampai kegiatan sosial lainnya.

Oleh karena itu setiap perangkat desa menjunjung tinggi komitmen, nilai etika dan kedisiplinan yang dijadikan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaannya.

Penerapan SOP dalam menjalankan kinerja perangkat desa dapat dikatakan cukup baik, yang mana setiap perangkat desa patuh kepada aturan yang sudah disepakati bersama dan berusaha untuk saling bekerjasama menjalankan komitmen mereka. Kemudian

kepala desa juga melakukan pemeriksaan mulai dari tugas dan fungsi masing- masing individu perangkat desa, misalkan sekretaris desa yang bertugasmelakukan penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Kemudian untuk penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan melalui musyawarah Desa (MusDes) yang nantinya akan disepati bersama oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Selanjutnya kepala urusan keuangan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap pelaporan pertanggungjawaban laporan keuangan desa gedangan dalam hasil penelitian untuk kinerjanya sudah cukup baik. Kepala urusan keuangan melakuakan koordinasi langsung dengan kepala desa terkait masukan Rancangan Peraturan Desa (RaPerDes) dan melakukan pelaporan untuk penutupan buku di setiap bulannya serta yang bertugas membuat laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian mendukung yang dilakukan oleh luh ayu marsita dan I gusti ayu eka, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* yang dimoderasi oleh *locus of control internal*.⁶⁴ Hasil penelitian menjelaskan bahwa disarankan agar pemerintah desa selalu memperhatikan pengendalian internal diri aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

⁶⁴ Luh ayu marsita dan I gusti ayu eka, *Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Penipuan*, dalam <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p26> diakses pada 21 Maret 2021

2. Implementasi Penilaian Resiko

Beberapa pengertian evaluasi memberikan makna suatu proses mengukur, menilai, dan memberi keputusan. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan dan membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.⁶⁵ Sedangkan penilaian resiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi berbagai resiko yang dihadapi oleh organisasi. Apabila resiko dapat dipahami dengan baik, maka manajemen dapat mengambil Tindakan yang tepat guna pencegahan, sehingga organisasi dapat menghindari kerugian yang besar⁶⁶.

Dalam praktiknya evaluasi dilakukan setiap satu minggu sekali yang dipimpin langsung oleh kepala desa gedangan. Biasanya evaluasi jatuh pada hari senin, dan untuk waktunya pun kondisional, dalam artian tidak ada patokan sampai jam berapa yang pasti rutin setiap minggunya. Evaluasi tersebut berupa pembinaan pada program-program kegiatan pemerintah desa gedangan serta pembahasan mengenai hambatan- hambatan dalam proses pekerjaan dari masing-masing perangkat desa.

Kemudian untuk penilaian resiko dengan memperhatikan hambatan-hambatan atau kendala agar bisa dijadikan sebagai nilai evaluasi dalam mengatasi resiko yang mungkin akan terjadi. Hal ini

⁶⁵ Yahya Hairun, *Evaluasi Dan Penilaian*, (Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2020), Hal. 26.

⁶⁶ V. wiratna sujarweni. *Sistem akuntansi...*, hal.73

sesuai dengan teori keselamatan dan kesehatan kerja manajemen dan implementasi oleh Djoko Setyo Widodo bahwa penilaian resiko harus “sesuai” dan “memadai” sesuai resiko Kesehatan dan keselamatan kerja yang dihadapi selama berada di tempat kerja. Sesuai dan memadai berarti bahwa Ketika kita melakuakn penilaian resiko, kita harapkan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi semua bahaya memperkenalkan pengendalian yang sesuai dan mengurangi resiko yang dapat diterima.⁶⁷ Penilaian resiko bisa jadi dikatakan membutuhkan beberapa masukan dari orang lain yang lebih berpengalaman dan mengetahui detail tentang tugas dan aktivitas terkait sebagaimana yang dilakukan kepala desa gedangan kepada perangkat desanya.

Hasil penelitian mendukung dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa: system pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandala pelaporan keuangan, pengamanan assert negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daaerah.

⁶⁷ Djoko Setyo Widodo, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Manajemen Dan Impelementasi*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2021), Hal. 52.

Hasil penelitian juga mendukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno Wulandari, terkait mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Sistem Pengendalian Internal, kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban dan upaya dalam menanggulangi kendala yang ada di dalam mekanisme pertanggungjawaban⁶⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) sudah dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sudah baik. Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat memudahkan perangkat desa dalam mengerjakan laporan keuangan desa. Adapun kendala yang dihadapi Desa Junwangi yaitu keterlambatan pencairan dana, sumber daya manusia, dan peran masyarakat.

3. Implementasi Informasi dan Komunikasi

Suatu organisasi merupakan sekumpulan unit pengambil keputusan untuk mengejar suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, setiap organisasi menerima input dan mengubahnya menjadi output.

⁶⁸ Retno Wulandari, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Desa (Studi Kasus Pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)* ..., Hal. 14

⁶⁹Komponen informasi dan komunikasi berisi rancangan sistem informasi organisasi yang memuat beberapa hal seperti bagaimana transaksi diawali; bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap di input ke komputer atau langsung dikonversi ke computer, sebagaimana informasi yang baik dilakukan, serta bagaimana informasi diolah untuk dijadikan sebagai bahan pengambil keputusan.⁷⁰

Implementasi informasi dan komunikasi pada pemerintahan desa gedangan ini berupa lisan maupun secara fisik berupa dokumen yang baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai informasi dan komunikasi yang memiliki kedudukan penting pada pemerintah desa gedangan melalui Musyawarah Desa (MusDes) yang telah disepakati bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rancangan kegiatan desa.

Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ely Ayuning Astuty, dengan tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, system pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se- Kecamatan

⁶⁹ George Dan William, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9, (Yogyakarta: Andi, 2009), hal.3

⁷⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Sistem Informasi Akuntansi...*, Hal. 73.

Muntilan.⁷¹ Hasil penelitian membuktikan bahwa system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Laporan Keuangan untuk Keefektifan Kinerja Perangkat Desa Gedangan

Dalam mencapai sasaran efektivitas dapat dijadikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan rodanya. Apabila suatu organisasi tersebut berhasil dalam mencapai sasarannya maka dapat dikatakan efektif. Pencapaian suatu tujuan atau target dari kebijakan (hasil guna) merupakan dasar efektivitas. Menurut Yamit efektivitas adalah ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai baik secara kualitas maupun waktu, dan orientasinya pada keluaran (output) yang dihasilkan.⁷²

Efektivitas dalam penelitian dilihat dari tugas kerjanya (*job characteristics model*) sebagaimana perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan teori good government governance yaitu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial melibatkan pengaruh sektor non pemerintahan dalam suatu usaha

⁷¹ Ely Ayuning Astuty, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Akseibilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

⁷² Suroso, *Evaluasi Egektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Infomedia Nusantara Medan...*, Hal. 32.

kolektif. Salah satu aturan utamanya adalah adanya wewenang dari pemerintah namun tidak sepihak. Karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Efektivitas kinerja dan sistem pengendalian internal dapat mencapai efektivitas apabila penerapannya dilakukan sesuai dengan komponen penyusunannya dan pengaturan kegiatan yang baik pada operasi yang dijalankan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ditambah lagi dengan adanya sistem informasi akuntansi yang merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut nantinya dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan.

Tabel 5.1
Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Komponen Pengendalian Internal	Keterangan
Implementasi Pengawasan	a. Pengawasan di dalam Pemerintahan Desa Gedangan dilakukan oleh Kepala Desa Gedangan. Dengan melakukan evaluasi setiap satu minggu sekali yang diikuti seluruh Perangkat Desa Gedangan. b. Adanya pengendalian internal secara rutin oleh kepala desa dengan memberikan pembinaan dan arahan terhadap program-program kerja.

Implementasi Penilaian Resiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan kedisiplinan b. Adanya aktivitas pemantauan dan pengendalian internal yang dilakukan langsung Oleh Kepala Desa Gedangan
Implementasi Informasi Dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya koordinasi antar kepala desa dengan perangkatnya b. Penyusunan laporan keuangan desa sebagai bentuk laporan realisasi keuangan desa di setiap periodenya c. Adanya laporan yang disertai dengan dokumen pendukung seperti nota dan kwintansi.

Uraian di atas, efektivitas kinerja perangkat desa dan implementasi sistem pengendalian internal dapat dikatakan berjalan dengan efektif dilihat dari keseluruhan ukuran efektivitas kinerja dan komponen implementasi sistem pengendalian internal. Meskipun ada beberapa hambatan yang ditemui dan unsur-unsur yang belum terpenuhi. Pada efektivitas kinerja perangkat desa kurangnya motivasi dari perangkat desa untuk belajar mengoperasikan komputer sebagai pendukung fasilitas pekerjaan agar lebih mudah.

Selanjutnya untuk memaksimalkan implementasi pengendalian internal di Pemerintahan Desa Gedangan diharapkan sosok kepala desa dapat mengayomi perangkat desanya dengan mengajarkan nilai-nilai etika pemerintahan yang baik melakukan pembinaan secara konsisten dalam program-program kerja yang terlalu tersusun serta dapat tercapainya laporan realisasi laporan keuangan desa gedangan yang baik. Kemudian untuk tugas dan fungsi perangkat desa dapat lebih diterapkan konsep *good government governance* sebagai acuan roda perputaran

pemerintahan desa gedangan.

Hasil penelitian mendukung yang dilakukan oleh Hendi Sandi Putra, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata Kelola pemerintahan desa⁷³. Peneliti menemukan bahwa tata Kelola pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek; transparansi penggunaan dana desa serta terkebukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.

Hasil penelitian mendukung juga dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gairah Laia, terkait dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa⁷⁴. Hasil penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa kinerja pemerintahan dalam mengelola ADD dan DD sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas.

⁷³ Hendi Sandi Putra, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*, dalam <http://journal.unair.ac.id/JPM@tata-kelola-pemerin> diakses pada 21 Maret 2021

⁷⁴ Gairah Laia, *Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan*, (Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan Telukdalam, 2019).